

Analisis Prosedur Pembiayaan Kredit Pada Pt. Kresna Reksa Finance

Aceng Kurniawan

Program Studi Akuntansi STIE STEMBI, aakhurnia@gmail.com

Muthia Nur Shabrina

Program Studi Akuntansi STIE STEMBI, muthianshabrina@gmail.com

Abstrak

Tujuan_ Sesuai dengan pokok permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan kredit pada PT. Kresna Reksa Finance.

Desain/Metode_ Jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan induktif, objek yang ditelitinya adalah prosedur pembiayaan kredit, sumber data didapat melalui wawancara. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke tempat usaha dan studi pustaka, dengan jenis data sekunder serta menggunakan metode analisis deskriptif.

Temuan_ prosedur pembiayaan kredit pada PT. Kresna Reksa Finance masih kurang selektif dalam memberikan pembiayaan kredit sehingga seringkali terjadi pembiayaan macet. Dan juga biaya administrasi yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa finance yang ada.

Implikasi_ PT. Kresna Reksa Finance harus lebih selektif, agar menghindari terjadinya pembiayaan macet. Dapat menyesuaikan biaya administrasi yang dinilai cukup tinggi.

Originalitas_ penelitian tentang analisis prosedur pembiayaan kredit pada PT. Kresna Reksa Finance belum pernah diteliti sebelumnya.

Tipe Penelitian_ Studi Empiris

Kata Kunci : Prosedur, Pembiayaan, Kredit, Pengendalian

I Latar Belakang

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang di cita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh diberbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata.

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring dengan perkembangan taraf hidupnya. Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana dalam dunia perekonomiannya.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapun lembaga-lembaga keuangan

menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya di dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan.

Disinilah kemudian mulai muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani para pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan. Sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan guna melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam menyalurkan kebutuhan dana maka timbullah lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan salah satu faktor diatas maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan.

Menurut (Sunaryo 2009) "Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan". Maksudnya menjadi salah satu sumber dana alternative bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Banyak terdapat lembaga-lembaga pembiayaan di Indonesia salah satu lembaga pembiayaan tersebut adalah PT. Kresna Reksa Finance yang memberikan bantuan modal usaha ekonomi rumah tangga skala mikro diarahkan pada usaha-usaha yang memiliki karakteristik dalam pemanfaatan produk unggulan dan memiliki peluang pasar, dengan harapan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat akan memberi nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

PT. Kresna Reksa Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Perusahaan ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana/kredit atau modal dengan tidak menarik biaya secara langsung dari masyarakat. Perusahaan ini didirikan secara khusus untuk melakukan kegiatan termasuk dalam usaha lembaga pembiayaan.

PT. Kresna Reksa Finance merupakan anggota dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 di Surabaya dan mulai beroperasi pada tahun 1995. Pada tahun 2000 telah terjadi perubahan kepemilikan saham perusahaan dan pemilik baru mulai memfokuskan operasi perusahaan pada bidang jasa pembiayaan khususnya sepeda motor. Sampai dengan Maret 2008 perusahaan ini memiliki 89 kantor Jaringan yang terdiri dari 19 kantor cabang, 4 kantor sub cabang, 45 kantor unit dan 21 kantor sub unit yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan dan Sulawesi.

Pinjaman atau kredit dalam arti luas diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari kepercayaan tersebut adalah kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan benar-benar akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Tujuan utama dari kredit itu sendiri adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan persyaratan yang terdapat didalam perjanjian.

Seringkali pengusaha kecil yang tidak punya catatan pembukuan yang jelas tidak dipercaya oleh bank. Karena mulai dari usaha kecil yang semua dilakukan sendiri termasuk catatan penjualan, sehingga tidak memungkinkan membuat catatan pembukuan yang baik dan rapi seperti pada perusahaan yang mempunyai staf tersendiri. Kondisi ini di anggap tidak layak mendapat pinjaman bank. Ada juga yang mencari pinjaman dalam jumlah kecil lebih sulit dari pada yang besar, karena bank menginginkan pendapatan besar, tentu pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman dalam jumlah kecil akan dinomorduakan. Semakin besar pinjaman akan mendapat bunga lebih kecil.

Tentu ini adalah teknik dagang umum, beli semakin banyak akan mendapatkan diskon lebih besar. Penetapan tujuan dalam suatu penelitian sangatlah penting sebagai awal dari kegiatan selanjutnya. Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan kredit pada PT. Kresna Reksa Finance.

II Kajian Teori

Pembiayaan

Pembiayaan menurut (Kasmir 2007) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

Lembaga pembiayaan atau dikenal dengan *multifinance* merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. (Arthesa and Edia 2006).

Menurut (Sunaryo 2009) Lembaga Pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan", maksudnya menjadi salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Prosedur

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Menurut (Masya 2003) mengatakan bahwa "Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang". Menurut (Kamarudin 2006) mengatakan bahwa: "Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi".

Menurut (Syamsi 2004) mengatakan bahwa: "Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan".

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Kredit

Kata kredit pada mulanya berasal dari bahasa latin yakni "Credere/Credo" yang berarti kepercayaan, sehingga seseorang yang memperoleh kepercayaan, karna unsur utama dalam memperoleh kredit kepercayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut (Sinungan 2003) menyatakan bahwa: "Kredit adalah kepercayaan dalam hal ini timbul bila ada pendekatan antara pembeli dengan penerima kredit untuk menimbulkan kepercayaan maka si pemberi kredit perlu meneliti terlebih dahulu apa, bagaimana dan calon si penerima kredit". Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berhubungan langsung yaitu pihak pemberi kredit (kreditur) dan pihak yang menerima kredit (debitur).

Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut (Kasmir 2007) sebelum fasilitas kredit di berikan maka perusahaan harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredo tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula

dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan 5 C.

Jaminan Kredit

Menurut (Kasmir 2003) untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian. Maka pihak perusahaan membuat pagar pengamanan dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga nasabah sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah (1). Jaminan dengan barang-barang (tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/ peralatan, barang dagangan, tanah/kebun/sawah, dan barang-barang yang berharga lainnya. (2). Jaminan surat berharga (sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, wesel, dan surat-surat berharga lainnya. (3). Jaminan orang dan perusahaan yaitu jaminan diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet maka orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggung jawabannya atau menanggung resikonya. (4). Jaminan Asuransi yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung dan lainnya. Jadi apabila kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang menanggung kerugian tersebut.

Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Secara umum proses pemberian Kredit menurut Kasmir (2007:10) adalah sebagai berikut: (1) Pengkajian berkas-berkas, dalam hal ini permohonan kredit dituangkan dalam suatu proposal, serta dilampirkan berkas - berkas lain yang dibutuhkan. (2). Penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap dan benar sesuai persyaratan. (3). Wawancara I, tujuannya untuk meyakinkan apakah berkas tersebut lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan. (4). On the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan jaminan. (5). Wawancara II, merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan setelah dilakukan on the spot di lapangan. (6). Keputusan Kredit, untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. (7). Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. (8). Realisasi Kredit. (9). Penyaluran atau penarikan dana.

Menurut (Kasmir 2004) "tinggi rendahnya penyaluran produk dan jasa yang dimiliki suatu bank yang tidak terlepas dari cara karyawan tersebut mempromosikan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada nasabahnya".

III Metode Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan induktif, objek yang ditelitinya adalah prosedur pembiayaan kredit, sumber data didapat melalui wawancara. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke tempat usaha dan studi pustaka, dengan jenis data sekunder serta menggunakan metode analisis deskriptif.

IV Hasil dan Pembahasan

Permohonan dan Persetujuan Pembiayaan Kredit

Proses pembiayaan secara kredit dimulai ketika calon konsumen pinjaman dana tunai datang ke kantor PT. Kresna Reksa Finance untuk melakukan pengajuan pinjaman dana tunai ke PT. KRF, setelah itu account officer akan menyiapkan Form Aplikasi Pembiayaan dan membuat perjanjian dengan calon konsumen untuk melakukan survey. Konsumen harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung diantaranya: Kartu Identitas (KTP), Kartu Keluarga (KK), Rekening listrik, slip

gaji/keterangan penghasilan. Setelah melakukan survey lapangan, account officer akan membuat analisa laporan hasil survey berupa Konfirmasi Hasil Survey (KHS). Kepala Cabang Marketing (Branch Marketing Manager/BMM) akan melakukan review dan analisa atas aplikasi pembiayaan kredit dari calon konsumen. Penulis juga menemukan bahwa review yang dilakukan dalam proses pemberian persetujuan kredit tanpa melalui proses BI checking. Untuk setiap aplikasi yang telah disetujui oleh BMM maka konsumen wajib menyerahkan surat BPKB untuk dijadikan sebagai jaminan. BPKB yang diterima akan disimpan didalam sebuah brankas tahan api dan tahan air. Kunci brankas secara fisik hanya dipegang oleh bagian legal, sedangkan kombinasi kode hanya diketahui oleh BFM.

a. Prosedur Administrasi sales

Berdasarkan jumlah dana yang dipinjam, bagian administrasi sales akan menginput data-data konsumen dan data piutang kedalam sistem aplikasi input sales. Kemudian, melakukan pencetakan atas voucher untuk permintaan pembayaran yang akan diserahkan ke bagian treasury (keuangan), bagian treasury akan melakukan pemeriksaan atas perhitungan kredit pembiayaan dana dan pemeriksaan kelengkapan dokumen tagihan, lalu menyiapkan pembayaran.

b. Prosedur Administrasi Penagihan

Bagian administrasi penagihan (collection) akan mencetak kwitansi tagihan berupa printed pre-number kwitansi yang akan ditandatangani oleh Kepala Cabang Finance (Branch Finance Manager/BFM) sesuai dengan tanggal jatuh tempo angsuran. Pada pagi hari administrasi penagihan menyerahkan kwitansi kepada kolektor dan membuat tanda terima atas kwitansi yang diserahkan ke kolektor. Kolektor akan membuat rekap atas kwitansi yang tertagih dan tidak tertagih pada sore hari saat kembali dari penagihan. Kolektor akan menyerahkan uang hasil penagihan ke bagian kasir. Bagian kasir akan mencatat penerimaan sebagai pembayaran dari konsumen dan membuat tanda terima setoran dan menyerahkan ke bagian administrasi penagihan. Untuk semua kwitansi yang tidak tertagih, kwitansi harus dikembalikan ke bagian administrasi penagihan. Berdasarkan tanda terima setoran yang diterima dari bagian kasir, administrasi penagihan akan melakukan pengecekan antara kwitansi fisik yang tidak tertagih dengan uang yang disetorkan oleh kasir. Apabila terjadi selisih antara uang yang disetorkan dengan kwitansi fisik yang diterima maka kolektor harus menyelesaikannya pada hari yang sama. Selisih antara kwitansi fisik tidak tertagih dan setoran hasil penagihan dapat disebabkan oleh kwitansi hilang, Kolektor harus membuat kronologis kwitansi hilang dengan persetujuan BFM, sehingga kwitansi baru bisa dicetak ulang dengan pre-number yang berbeda. Kolektor wajib membayarkan antara selisih antara setoran dengan total tagihan pada kwitansi yang hilang. Setiap akhir bulan BFM akan melakukan opname terhadap fisik kwitansi yang belum tertagih sebagai bentuk pertanggung jawaban dari bagian administrasi penagihan.

c. Prosedur Administrasi Kredit Macet

Kredit dianggap bermasalah/macet, apabila konsumen tidak melakukan pembayaran lebih dari dua minggu terhitung sejak tanggal jatuh tempo kredit. Bagian administrasi penagihan akan mengirim surat peringatan kepada konsumen. Untuk setiap keterlambatan pembayaran PT. KRF akan mengenakan denda sebesar 0.5% dari total angsuran perharinya kepada konsumen. Apabila konsumen tidak menyelesaikan pembayarannya maka bagian penagihan akan melakukan penarikan atas motor yang telah dijaminkan BPKBnya. Apabila motor: (1). Berhasil ditarik -> konsumen diberikan tenggang waktu selama dua minggu untuk melakukan pelunasan. Apabila konsumen dapat membayarkan angsurannya maka motor akan dikembalikan. Jika tidak, maka motor akan dijual oleh PT. KRF untuk melunasi sisa hutang perusahaan. (2). Tidak berhasil ditarik -> PT. KRF memiliki bagian/team khusus (pihak internal) yang akan menangani hal tersebut, yang bekerja sama dengan pihak keamanan tempat konsumen tinggal (RT/RW,dll) untuk melakukan pengintaian untuk penyelesaian kasus kredit macet.

Pengendalian Internal

Dalam pelaksanaan operasionalnya, PT. KRF menerapkan pengendalian internal perusahaan sebagai berikut: Pengendalian internal secara fisik untuk setiap BPKB yang diterima akan disimpan didalam sebuah brankas tahan api dan tahan air. Kunci brankas secara fisik hanya dipegang oleh bagian legal, sedangkan kombinasi kode hanya diketahui oleh BFM. Segregation of

duties (pemisahan tugas/fungsi) dari masing-masing department yang kritikal, yaitu: pemisahan antara tugas antara pelaku survey dengan pemberi persetujuan kredit, fungsi penagihan dan penerimaan setoran, Laporan pertanggung jawaban bagian penagihan yang dilakukan secara harian (on daily basis), sehingga resiko (contoh: kredit macet/setoran yang tidak dibayarkan) yang mungkin timbul dapat diminimalisasikan. Penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan secara efektif digunakan sebagai rewards dan punishment untuk masing-masing department yang terkait. Contoh:

- *KPI BMM, Tingkat keberhasilan penagihan (collection) minimal adalah 95% per bulan. Apabila kurang dari 95% per bulan, maka BMM tidak berhak mendapatkan bonus dan bila terjadi sebanyak lebih dari enam kali dalam satu tahun atau terjadi dalam tiga kali berturut-turut, maka BMM akan berakhir dengan pemberhentian kerja.*
- *KPI Kolektor, Tingkat keberhasilan penagihan (collection) minimal adalah 96% per bulan. Apabila kurang dari 95% per bulan, maka Kolektor tidak berhak mendapatkan bonus dan bila terjadi sebanyak lebih dari enam kali dalam satu tahun atau terjadi dalam tiga kali berturut-turut, maka Kolektor akan berakhir dengan pemberhentian kerja*
- *KPI Surveyor, Minimal aplikasi kredit yang disetujui dalam 1 bulan adalah 18 aplikasi. Apabila kurang dari 18 per bulan, maka Surveyor tidak berhak mendapatkan bonus dan bila terjadi sebanyak lebih dari enam kali dalam satu tahun atau terjadi dalam tiga kali berturut-turut, maka Surveyor akan berakhir dengan pemberhentian kerja.*

V Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT. Kresna Reksa Finance, maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pembiayaan kredit pada PT. Kresna Reksa Finance masih kurang selektif dalam memberikan pembiayaan kredit sehingga seringkali terjadi pembiayaan macet. Dan juga biaya administrasi yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa finance yang ada.

Adapun saran yang dapat penulis berikan, dalam memberikan pembiayaan kredit, PT. Kresna Reksa Finance harus lebih selektif, agar menghindari terjadinya pembiayaan macet. Jika dibandingkan dengan beberapa finance yang ada, biaya administrasi cukup tinggi, alangkah baiknya jika biaya administrasinya bisa disesuaikan.

Daftar Pustaka

- Arthesa, Ade, and Handiman Edia. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT Indeks kelompok Gramedia.*
- Kamarudin. 2006. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam. Yogyakarta: UII Pres.*
- Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- . 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- . 2007. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Masya, Ismail. 2003. Teori Prosedur. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- Silvanita, Ktut Mangani. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Erlangga.*
- Sinungan, Muchdarsyah. 2003. Manajemen Dana Bank. Jakarta: PT. Bumi Aksara.*
- Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Syamsi, Ibnu. 2004. Sistem dan Prosedur Kerja. Jakarta: PT Bumi Aksara*